



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN  
ANGGARAN 2013 – 2020**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Shalaisya Labiba Khayyira Widodo

0221 18 115

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**OKTOBER 2022**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 – 2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)

*Arief*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 – 2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022

Shalaisya Labiba Khayyira Widodo

0221 18 115

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

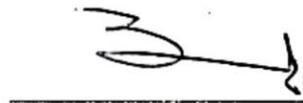
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM., CA)



---

Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Buntoro Heri Prasetya, SE., MM)



---

Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edy Surono, Drs., Ak., M.M)



---

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA  
PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalaisya Labiba Khayyira Widodo  
NPM : 0221 18 115  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan  
Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  
Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Oktober 2022



Shalaisya Labiba  
Khayyira Widodo  
022118115

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

SHALAISYA LABIBA KHAYYIRA WIDODO. 022118115. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020. Di bawah bimbingan: BUNTORO HERI PRASETYA dan SIGIT EDY SURONO.2022.

Kinerja Keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Dalam penelitian ini mengambil variabel PAD, DAU, dan DAK karena merupakan indikator pendapatan daerah untuk mengukur kemandirian suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun 2013 – 2020.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah Kota Bogor dalam situs Badan Pusat Statistik menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi menggunakan software SPSS 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan DAK juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor.

***Kata kunci : pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kinerja keuangan***

## PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020**. Adapun maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat Kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penulis sadari bahwa dalam penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan sehubungan dengan keterbatasan yang penulis miliki. Walaupun demikian, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak segala kekurangan tersebut dapat teratasi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT telah memberikan nikmat, karunia, perlindungan dan kesehatan kepada penulis selama melakukan penyusunan.
2. Bapak, Ibu, dan Aa Daffa yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat dan doa tiada henti untuk keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektorat Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menuntut ilmu.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah L. SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc. selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA, CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian.

10. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., Ak., M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian.
11. Dosen – dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
13. Farel Zalda Risyahman, yang telah memberikan semangat, masukan, dan membantu selama penyusunan penelitian.
14. Semua sahabat – sahabat dari SMA dan Kuliah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
15. Semua teman – teman dari kelas C Akuntansi dan Organisasi HMA FEB Unpak angkatan 2018 yang banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran baru.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan doa dan bantuannya dalam penyusunan penelitian ini.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2022

Penulis

Shalaisya Labiba Khayyira Widodo

## DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	
LEMBAR HAK CIPTA	
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	5
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Keuangan Daerah .....	7
2.2 Pendapatan Daerah .....	8
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.2.2 Dana Alokasi Umum.....	10
2.2.3 Dana Alokasi Khusus .....	11
2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11

2.3.2	Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan .....	12
2.3.3	Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan .....	12
2.4	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Berpikir .....	14
2.4.1	Penelitian Sebelumnya .....	14
2.4.2	Kerangka Pemikiran.....	21
2.5	Hipotesis Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	24
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	24
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	24
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	24
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	25
3.6	Metode Pengolahan/Analisis Data.....	25
3.6.1	Statistik Deskriptif .....	26
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	26
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	27
3.6.4	Uji Parsial (t).....	28
3.6.5	Uji Simultan (Uji F) .....	28
3.6.6	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>		<b>30</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Kota Bogor.....	30
4.1.2	Geografis Kota Bogor .....	31
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	32
4.2	Variabel yang Diteliti .....	35
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	35
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	38
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	39
4.2.4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	41
4.3	Analisis Data .....	43
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	49

4.3.4	Hasil Uji Hipotesis .....	50
4.4	Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian .....	53
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	53
4.4.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	54
4.4.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	54
4.4.4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....		57
5.1	Simpulan .....	57
5.2	Saran .....	58
5.2.1	Kegunaan Praktis .....	58
5.2.2	Kegunaan Akademis .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....		60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		63
LAMPIRAN .....		64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pertumbuhan Realisasi PAD, DAU, dan DAK Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020.....	2
Tabel 2.1	: Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah.....	14
Tabel 2.2	: Penelitian Sebelumnya.....	14
Tabel 3.1	: Operasionalisasi Variabel .....	25
Tabel 3.2	: Klasifikasi Koefisien Determinasi.....	30
Tabel 4.1	: Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor .....	36
Tabel 4.2	: Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor .	37
Tabel 4.3	: Rasio Ketergantungan DAU Terhadap Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor .....	38
Tabel 4.4	: Rasio Ketergantungan DAK Terhadap Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor .....	40
Tabel 4.5	: Rincian Dana Transfer Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 - 2020.....	41
Tabel 4.6	: Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Diukur Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 – 2020 .....	42
Tabel 4.7	: Analisis Statistik Deskriptif .....	43
Tabel 4.8	: Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	45
Tabel 4.9	: Hasil Uji Multikolinearitas .....	46
Tabel 4.10	: Hasil Uji Autokorelasi .....	47
Tabel 4.11	: Hasil Uji Heterokedastisitas Gleser.....	48
Tabel 4.12	: Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda .....	49
Tabel 4.13	: Hasil Uji Parsial .....	50
Tabel 4.14	: Hasil Uji Simultan .....	52
Tabel 4.15	: Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Grafik Pertumbuhan PAD, DAU, dan DAK Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 .....	3
Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir .....	22
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	33
Gambar 4.2	: Grafik Perkembangan PAD Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 .....	38
Gambar 4.3	: Grafik Perkembangan DAU Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 .....	40
Gambar 4.4	: Grafik Perkembangan DAK Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 .....	41
Gambar 4.5	: Grafik Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 .....	43
Gambar 4.6	: Hasil Uji Normalitas Plot .....	45
Gambar 4.7	: Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplots .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Tabel Uji t .....	63
Lampiran 2	: Tabel Uji F .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setelah era reformasi, sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat terpusat mulai berubah menjadi desentralisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jo. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai urusan pemerintahan yang diurus bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan tujuan menghindari terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan sehat antar daerah, dan mendorong timbulnya inovasi. Penerapan kebijakan otonomi daerah adalah agar daerah mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemandirian dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya harus sesuai Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 77 Tahun 2020 jo. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi- potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya (Prastiwi dan Aji, 2020). Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini akan diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat

menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti: dana transfer dari pusat (Halim, 2007).

Terdapat beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (Angelina, Efni dan Rasuli, 2020). Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jo. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah ini juga merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jo. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dapat diketahui tingkat pertumbuhan realisasi PAD, DAU, dan DAK dari tahun 2013 – 2020. Untuk lebih jelasnya berikut terdapat tabel data pertumbuhan realisasi PAD, DAU, dan DAK Kota Bogor tahun 2013 – 2020:

Tabel 1.1

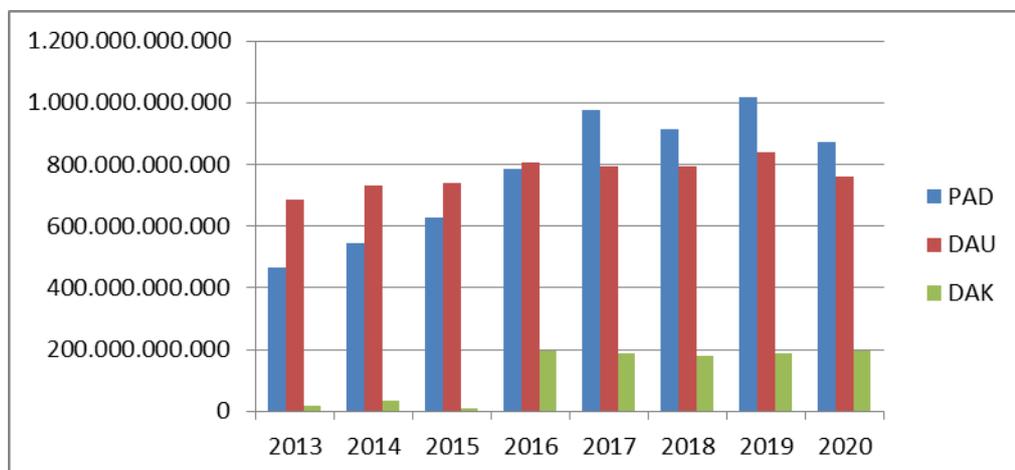
Pertumbuhan Realisasi PAD, DAU, dan DAK Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 (Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	%	DAU	%	DAK	%
2013	464.695.880.485		686.520.759.000		19.667.663.000	
2014	544.835.708.254	17	732.337.058.000	7	33.477.500.000	70
2015	627.597.050.141	15	737.833.158.000	1	8.616.560.000	- 74
2016	783.873.587.219	25	806.089.544.000	9	194.681.619.028	2.159
2017	978.197.741.947	25	791.929.143.000	- 2	190.013.867.775	- 2
2018	912.197.971.288	- 7	791.929.143.000	0	179.875.196.265	- 5
2019	1.015.884.216.919	11	838.948.449.000	6	189.891.532.535	6
2020	872.017.242.152	- 14	762.556.115.000	- 9	195.601.128.198	3

Sumber: BPS Kota Bogor (diolah, 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2013 – 2020 Kota Bogor mengalami fluktuasi setiap tahunnya dalam pertumbuhan realisasi PAD yang dilihat melalui persentase. PAD mengalami pertumbuhan dari tahun 2014 hingga 2017 dan 2019 yaitu sebesar 17%, 15%, 25%, 25% dan 11%. Namun, di tahun 2018 dan 2020 PAD tidak mengalami pertumbuhan dilihat dari hasil minus yang didapatkan yaitu sebesar -7% dan -14%. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Kota Bogor belum mampu meningkatkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Selanjutnya, DAU dan DAK juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. DAU masih terus mengalami kenaikan pada tahun 2014 hingga 2016 dan 2019 yaitu sebesar 7%, 1%, 9% dan 6%. Sedangkan DAK mengalami kenaikan drastis pada tahun 2016 dan masih mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 6% hingga tahun 2020 sebesar 3%. Hal tersebut menandakan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Bogor masih kuat terhadap pemerintah pusat. Maka dari hasil pertumbuhan realisasi PAD, DAU, dan DAK dapat diindikasikan bahwa kinerja Kota Bogor belum maksimal yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat pertumbuhan PAD dan masih adanya pertumbuhan DAU dan DAK.

Secara visual, rincian PAD, DAU, dan DAK yang telah disebutkan diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini: (Dalam Rupiah)



Sumber: BPS Kota Bogor (diolah, 2022)

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan PAD, DAU, dan DAK Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020

Maka berdasarkan data diatas dapat ditemukan fenomena berupa masih rendahnya tingkat pertumbuhan PAD dan masih adanya pertumbuhan DAU dan DAK yang mengindikasikan kinerja keuangan yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat menurunkan kemandirian pemerintah daerah dimana akan berimplikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah (Prastiwi dan Aji, 2020). Dan juga semakin besar transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang akan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun (Budianto dan Alexander, 2016).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Machmud dan Radjak (2018) mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun berdasarkan hasil penelitian Angelina, Efni dan Rasuli (2020) mengenai Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 – 2020”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan daerah. Namun bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor diindikasikan belum maksimal hal tersebut dilihat dari pertumbuhan pendapatan asli daerah yang masih rendah sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus masih terdapat kenaikan pertumbuhan. Maka dapat diindikasikan juga bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah Kota Bogor terhadap pemerintah pusat.

Hal ini juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu, namun masih terdapat hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk kembali menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan. Dengan memperoleh data yang kemudian dianalisis dengan perhitungan yang tepat, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat memberi saran kepada Pemerintah Kota Bogor untuk lebih memperhatikan terkait kinerja keuangan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama – sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak internal Pemerintah Daerah Kota Bogor dan pihak eksternal yang terkait.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan buku “Keuangan Daerah” (Khusaini, 2018), keuangan daerah perlu dikelola dengan baik, pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 terdiri dari:

- 1) Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman pihak ketiga
- 3) Penerimaan daerah
- 4) Pengeluaran daerah
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum

Sejak mulai berlakunya sistem desentralisasi, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip – prinsip manajemen keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, dalam prinsip ini pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan yang ada harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan
2. Transparansi, dalam prinsip ini diperlukan keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat
3. Kejujuran, dalam prinsip ini pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi

4. Value For Money. dalam prinsip ini pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dioperasikan dengan memperhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi
5. Pengendalian, dalam prinsip ini dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD

## **2.2 Pendapatan Daerah**

### **2.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017:119).

Terdapat beberapa komponen PAD, diantaranya:

1. Pajak Daerah, dimana menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 juga dijelaskan jenis pajak daerah yang dibedakan menjadi:
  - a) Pajak Provinsi, meliputi:
    - Pajak Kendaraan Bermotor
    - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - Pajak Air Permukaan
    - Pajak Rokok
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
    - Pajak Hotel
    - Pajak Restoran
    - Pajak Hiburan
    - Pajak Reklame
    - Pajak Penerangan Jalan
    - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Pajak Parkir
  - Pajak Air Tanah
  - Pajak Sarang Burung Walet
  - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah, dimana menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 juga dijelaskan jenis retribusi daerah, yang dibedakan menjadi:
- a) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
    - Retribusi Pelayanan Kesehatan
    - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
    - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
    - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
    - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
    - Retribusi Pelayanan Pasar
    - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
    - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
    - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
    - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
  - b) Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
    - Retribusi Tempat Pelelangan
    - Retribusi Terminal
    - Retribusi Tempat Khusus Parkir
    - Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggaan/ Villa
    - Retribusi Penyedotan Kakus
    - Retribusi Rumah Potong Hewan
    - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
    - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
    - Retribusi Penyeberangan di Atas Air
    - Retribusi Pengolahan Limbah Cair
    - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
    - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
    - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- Retribusi Izin Gangguan
  - Retribusi Izin Usaha Periklanan
  - Retribusi Izin Trayek
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, meliputi:
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah ((BUMD)
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan lain – lain PAD yang sah terdiri dari:
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - Jasa giro
  - Pendapatan bunga
  - Tuntutan ganti rugi
  - Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
  - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

### **2.2.2 Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ini merupakan transfer dana yang bersifat block grant yang artinya ketika dana tersebut diberikan pemerintah daerah memiliki keleluasan di dalam penggunaan DAU sesuai kebutuhan masing – masing daerah (Halim, 2016: 127). Selain itu, dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU ini akan memberikan kemampuan bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing – masing daerah dengan proporsi sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Dana alokasi umum memiliki proporsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi yang telah ditetapkan adalah dengan imbangan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dasar dalam dana alokasi umum (DAU), yaitu meliputi (Siregar, 2016: 17): (a) Kecukupan, (b) Netralitas dan Efisiensi, (c) Akuntabilitas, (d) Relevansi dengan tujuan, (e) Keadilan, (f) Objektivitas dan Transparansi dan (g) Kesederhanaan.

### **2.2.3 Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 juga dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, khusus, dan kriteria teknis sebagai berikut:

- Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD
- Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan karakteristik daerah
- Kriteria Teknis ditetapkan oleh kementerian Negara atau departemen teknis

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007, untuk penggunaan dana perimbangan khususnya DAK dialokasikan kepada daerah tertentu yang digunakan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain – lain yang sesuai dengan petunjuk teknis yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Untuk lebih jelasnya arah dari penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini antara lain:

- Mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan
- Meningkatkan penyediaan fasilitas dan kualitas kesehatan
- Meningkatkan kualitas pendidikan
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Penanganan masalah urban (daerah perkotaan)

## **2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Dimana dalam PMK RI No. 202 Tahun 2012, disebutkan kriteria kinerja keuangan diantaranya adalah daerah yang mampu meningkatkan atau mempertahankan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan, daerah yang menetapkan peraturan daerah mengenai APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, daerah yang mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah di atas rata – rata nasional, dan daerah yang menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri – ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Zulkarnain et al, 2019). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juga dikemukakan bahwa, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel salah satunya adalah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah (Halim, 2013). Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai kondisi kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer (Siregar, 2016).

### **2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam hal mengelola keuangan daerah sehingga proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendaan yang bersumber dari pemerintah pusat (Putri dan Darmayanti, 2019). Untuk lebih jelasnya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016: 121):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

### **2.3.3 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan**

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan dengan

memperhitungkan indikator masukan (inputs), indikator proses (process), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits), dan indikator dampak (impacts). Berikut ini penjelasan untuk setiap indikator, yaitu (Mahsun, 2017: 196):

1. Indikator masukan (inputs,) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan menghasilkan keluaran. Indikator masukan dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang – undangan, dan sebagainya
2. Indikator proses (process), merupakan perumusan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
3. Indikator keluaran (outputs), merupakan segala sesuatu yang diharapkan dapat langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
4. Indikator hasil (outcomes), merupakan segala sesuatu yang dapat mencerminkan berfungsinya kegiatan secara langsung
5. Indikator manfaat (benefits), merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang diadakan
6. Indikator dampak (impacts), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik dalam hal positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan

Selain itu, salah satu alat yang dapat digunakan sebagai analisa kinerja keuangan daerah ini adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Dalam penelitian ini analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat didefinisikan sebagai kondisi kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer (Siregar, 2016). Berikut rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya berikut terdapat tabel mengenai pola hubungan kemandirian keuangan daerah:

Tabel 2.1  
Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	> 75%

Sumber: Kiak dan Nuro (2018)

## 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Berpikir

### 2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018) "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Data laporan realisasi anggaran pemeirntah Kabupaten Gorontalo periode 2012– 2016	Analisis regresi linier berganda, uji F, uji T, uji koefisien determinasi	Secara parsial: - PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan - DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Secara simultan: - PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2	<p>Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)”</p>	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p>	<p>Data laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013– 2018</p>	<p>Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji regresi linier berganda, uji F, uji T, uji koefisien determinasi</p>	<p>- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Dana keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>- PAD, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan</p>
---	---	---	--	---	---

3	Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Data laporan APBD kabupaten / kota di Sumatera Utara periode 2015 – 2017	Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji F, uji T, uji koefisien determinasi, Analisis regresi linier berganda	- PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
4	Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli (2020)” Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018”	Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan  Variabel Moderating: Belanja Modal	Data laporan keuangan Kabupaten/ Kota Provinsi Riau periode 2014– 2018	Analisis statistik deskriptif, uji normalitas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi	- Belanja modal, PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan - Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
5	Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) “Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali”	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Data laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Periode 2012– 2016	Analisis regresi linear berganda, analisis statistik deskriptif, uji F, uji T	- PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

6	Budianto dan Stanly W Alexander (2016) “Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara”	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Utara	Uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis	Secara parsial: - PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan - Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Secara simultan: - PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
7	Mulia Andirfa, Hasan Basri dan M. Shabri A. Majid (2016) “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh”	Variabel independen: Belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah  Variabel dependen: kinerja keuangan	Data bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah Kab/kota di Provinsi aceh periode 2011– 2013	Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), Analisis regresi linier berganda	Secara parsial: - Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan - Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan - PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Secara simultan: - Belanja modal, dana perimbangan dan PAD secara bersama – sama berpengaruh terhadap

					kinerja keuangan
8	Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati dan Bambang Suryono (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”	Variabel independen: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi  Variabel kontrol: belanja modal  Variabel dependen: Kinerja keuangan	Laporan realisasi APBD Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015– 2017	Uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 24	- PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan - Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan - Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan - Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

9	Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita dan Nurhidayah (2020) “Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”	Variabel independen: PAD, dana perimbangan  Variabel dependen: Kinerja keuangan	Laporan realisasi APBD Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera selatan periode 2014– 2016	Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji koefisien determinasi, uji T, Analisis regresi berganda	- PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan - DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan - DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan - DBH tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
10	Berti Indah Sari dan Halmawati (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat”	Variabel independen: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah  Variabel dependen: kinerja keuangan	Laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2018	Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda dengan SPSS	- PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan - DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

Sumber: Machmud, J. & Radjak, L. (2018), Prastiwi, N. & Aji, A. (2020), Saraswati, D. & Rioni, Y. (2019), Angelina, N., Efni, Y. & Rasuli, M. (2020), Putri, N. & Darmayanti, N. (2019), Budianto & Alexander, S. (2016), Andirfa, M., Basri, H. & Majid, M. (2016), Heryanti, C., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019), Verawaty., et al. (2020), Sari, B. & Halmawati (2021).

Berdasarkan pada tabel penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas maka berikut penjabaran mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan yang dimiliki antara keduanya adalah subyek dan periode data yang digunakan, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan subyek Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan periode tahun 2012 – 2016.

2. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan yang dimiliki antara keduanya adalah variabel independen, subyek dan periode data yang digunakan, yaitu pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen berupa belanja modal dengan menggunakan subyek Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2013 – 2018.

3. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan yang dimiliki antara keduanya adalah variabel independen, subyek dan periode data yang digunakan, yaitu pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen berupa ukuran pemerintah daerah, leverage dengan menggunakan subyek Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan periode tahun 2015 – 2017.

4. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli (2020)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan yang dimiliki antara keduanya adalah variabel independen, subyek dan periode data yang digunakan, yaitu pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen berupa belanja modal dengan menggunakan subyek Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan periode tahun 2014 – 2018.

5. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019)

Persamaan yang dimiliki diantaranya dalam menggunakan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan yang dimiliki antara keduanya adalah subyek dan periode data yang digunakan, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan subyek Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali dan periode tahun 2012 – 2016.

## **2.4.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan**

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. PAD memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Sehingga terdapat keterkaitan antara PAD dengan kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini karena PAD memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah dapat meminimalkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prastiwi & Aji (2020) yang menyatakan semakin tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **2.4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan**

Dana alokasi umum (DAU) menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat keterkaitan antara DAU dengan kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini karena DAU merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budianto & Alexander (2016) yang menyatakan semakin besar transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang akan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun.

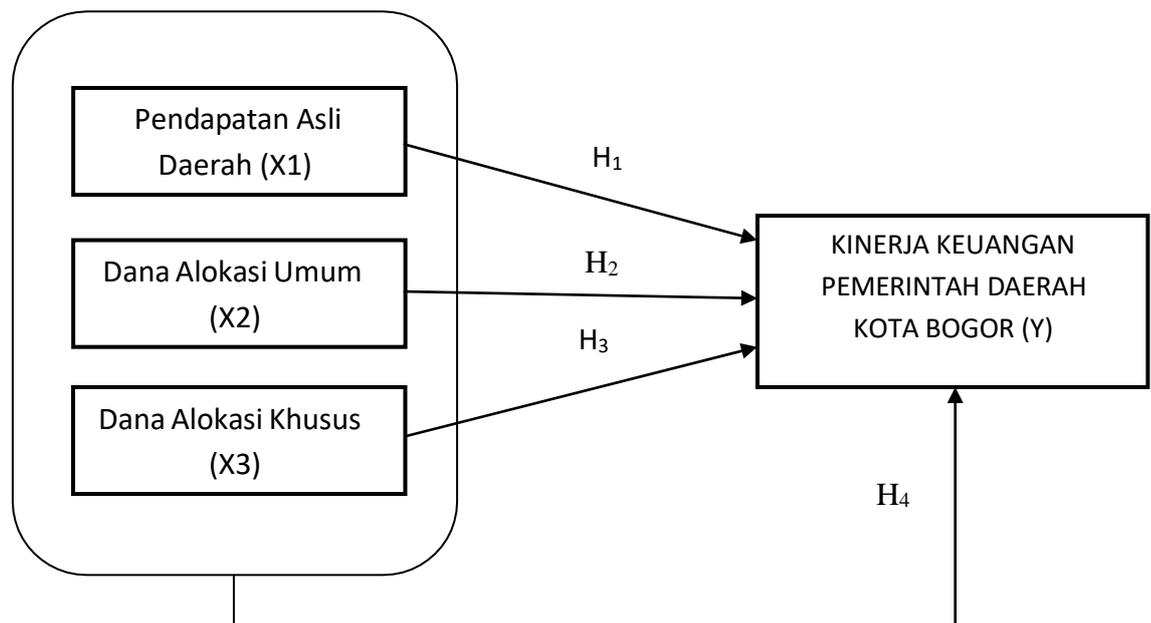
### **2.4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan**

Dana alokasi khusus (DAK) menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terdapat keterkaitan DAK dengan kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini karena DAK juga merupakan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Sejalan dengan DAU dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan Budianto & Alexander (2016) menyatakan bahwa semakin besar transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat maka

semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang akan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun.

#### 2.4.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki kontribusi sebagai sumber pembiayaan daerah. Peningkatan PAD ini akan mendorong kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik hal ini karena PAD merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah yang dapat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Sedangkan peningkatan DAU dan DAK juga dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang baik hal ini karena DAU dan DAK merupakan dana transfer sehingga semakin besar dana transfer menandakan ketergantungan yang kuat antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud & Radjak (2018) yang menyatakan bahwa secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel – variabel yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

#### 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas diatas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian verifikatif dengan teknik statistik kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey, yaitu metode yang bertujuan menguji hipotesis, yang umumnya menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini variabel yang dimaksud berupa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen.

Unit analisis yang digunakan adalah Geographic Region, yaitu yang diteliti adalah daerah sehingga data yang diperoleh berasal dari suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah Pemerintah Daerah di Kota Bogor.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi BPS Kota Bogor, yaitu bogorkota.bps.go.id berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bogor periode 2013 – 2020. Data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang berupa angka – angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya kemudian dikumpulkan dari sumber – sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber – sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.

#### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel diperlukan sebagai acuan dalam penggunaan instrumen penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Untuk mempermudah dalam proses analisis tersebut, maka penulis mengklasifikasikan variabel – variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas/Tidak Terikat)  
Variabel Independen merupakan variabel yang menjadi sebab atau memengaruhi variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
2. Variabel Dependen (Variabel Tidak Bebas/Terikat)  
Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan.

Penjabaran mengenai masing – masing variabel ke dalam indikator, ukuran, dan skala data dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

## Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Independen (X1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio kemampuan keuangan daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
2	Independen (X2) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah	$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
3	Independen (X3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rasio ketergantungan DAK terhadap keuangan daerah	$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
4	Dependen (Y) Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Mahmudi (2016) dan Prakoso, J., Islami, F., & Sugiharti, R. (2019)

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor untuk periode 2013 – 2020 yang diperoleh dari situs resmi BPS Kota Bogor (bogorkota.bps.go.id). Dari Laporan

Realisasi Anggaran ini diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Maka metode pengumpulan data untuk data sekunder yang digunakan adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen – dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data**

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode penelitian yang dapat digunakan adalah dengan menganalisa data yang sebelumnya telah dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistika inferensial, yaitu berupa regresi dan korelasi dengan menggunakan software SPSS 26 untuk mempermudah melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan untuk mendapat suatu kesimpulan.

Untuk itu dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018:19).

#### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Hal ini dikarenakan model yang baik harus dapat memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Berikut beberapa uji asumsi klasik yang perlu dilakukan:

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Jika tidak normal maka prediksi yang telah dilakukan dengan metode tersebut akan tidak baik atau dapat menghasilkan prediksi yang menyimpang (Ghozali, 2016: 160-161). Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji plot dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan level signifikan sebesar 0,05. Apabila hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Namun jika hasil menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual tidak terdistribusi dengan normal.

##### **2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan Gleser dan *Scatterplots*. Dimana apabila tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *Scatterplots*, serta titik – titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 sumbu Y dan nilai signifikan lebih besar 0,05 maka tidak ditemukan gejala heterokedastisitas. Namun jika nilai signifikansi dari variabel independen kurang dari 0,05 maka terindikasi terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 137-138).

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau periode sebelumnya (Ghozali, 2017: 93). Model regresi yang baik adalah yang tidak ditemukan masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan Run Test. Jika hasil nilai Asymp. Sig (2-Tailed) > 0,05 maka tidak ditemukan gejala autokorelasi.

### 4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factory (VIF). Apabila nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance lebih kecil dari 0,01 atau VIF lebih besar dari 10. Jadi nilai Tolerance lebih tinggi dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji statistik regresi linier digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen (Priyono, 2016). Atau analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jika variabel independennya lebih dari satu, maka regresi yang akan dihasilkan adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda maka asumsi klasik harus sudah terpenuhi. Dengan analisis ini maka dapat diketahui pengaruh dari masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang meliputi secara simultan maupun parsial. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor
a	: Konstanta
X1	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2	: Dana Alokasi Umum (DAU)
X3	: Dana Alokasi Khusus (DAK)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Regresi Variabel Independen
e	: eror

#### 3.6.4 Uji Parsial (t)

Uji t merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 88). Uji t ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah terkait dengan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018: 223). Kriteria yang dapat digunakan dalam menerima atau menolak H1 adalah sebagai berikut:

- Jika  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  dan nilai probabilitas  $>$  level of significant sebesar 0,05 maka H1 ditolak, yang menunjukkan secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika  $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  dan nilai probabilitas  $<$  level of significant sebesar 0,05 maka H1 diterima, yang menunjukkan secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.6.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali 2017: 22). Uji F memiliki nilai signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen terhadap Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- Jika  $F\text{hitung} \geq F\text{tabel}$  dan nilai signifikansi  $F < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Jika  $F\text{hitung} \leq F\text{tabel}$  dan nilai signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.6.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2017: 21). Nilai dari koefisien determinasi yang kecil atau mendekati nol menandakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel – variabel terikatnya sangat terbatas. Sebaliknya, semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi menandakan bahwa semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel – variabel terikatnya. Untuk lebih jelasnya berikut asumsi mengenai koefisien determinasi:

Secara umum koefisien determinasi besarnya berada diantara 0 dan 1 atau ( $0 < R^2 < 1$ ), maka:

- Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen
- Nilai  $R^2$  yang mendekati nilai 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi mengenai variabel dependen sangat terbatas.

Selain itu terdapat tabel klasifikasi koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

#### Klasifikasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19	Sangat Lemah
0,20 – 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

*Sumber: Sugiyono (2015)*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Bogor periode 2013 – 2020. Pemerintah Daerah Kota Bogor yang telah menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada BAB III.

##### 4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Bogor

Kota Bogor yang dijuluki sebagai Kota Hujan kota penting dimana awalnya merupakan Ibu Kota Kerajaan Pajajaran sampai kini akhirnya menjadi kota penyanggah Ibu Kota Negara. Kota Bogor memiliki sejarah yang cukup panjang yang dimulai sejak abad IV Masehi. Terdapat sejumlah tulisan sejarah yang menyebutkan bahwa Bogor menjadi pusat pemerintahan kerajaan terbesar yang menguasai bumi Pasundan pada sekitar abad 13 – 15 Masehi.

Secara umum, penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor memiliki hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, Ibukota Pajajaran. Dalam Naskah Carita Waruga Guru (1750-an) yang berbahasa Sunda Kuna ini dijelaskan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan karena di lokasi tersebut terdapat banyak pohon Pakujajar. Sama halnya dalam tulisan berjudul *De Batoe Toelis te Buitenzorg* (Batutulis di Bogor) tahun 1869, dimana Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, disana banyak terdapat pohon paku. Sehingga menurutnya Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. Sedangkan menurut G.P. Rouffaer (1919) dalam *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* edisi Stibbe. “Pakuan” mengandung arti setara dengan “Maharaja” dan “Pajajaran” dapat diartikan sebagai “berdiri sejajar” yang dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran berarti Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan (Maharaja) Majapahit. Menurut R.Ng.Poerbatjaraka (1921) dalam tulisan *De Batoe-Toelis bij Buitenzorg* (Batutulis dekat Bogor) menjelaskan bahwa kata “Pakuan” berasal dari bahasa Jawa kuno “Pakwwan” yang kemudian dieja “Pakwan” yang berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka berarti “istana yang berjajar”. Sebutan “Pakuan”, “Pajajaran”, dan “Pakuan Pajajaran” dapat kita temukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 dan 2) sedangkan nomor 3 bisa ditemukan pada Prasasti Kebantenan di Bekasi.

Selanjutnya setelah Indonesia lepas dari penjajahan, Kota Bogor ditetapkan menjadi kota besar berdasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 1950. Dimana selanjutnya berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor. Kemudian berdasarkan pada UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Terakhir, dengan

diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 berubah kembali menjadi Kota Bogor hingga sekarang. Hari lahir Kota Bogor ditetapkan pada tanggal 3 Juni 1482 berdasarkan peristiwa pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi.

#### **4.1.2 Geografis Kota Bogor**

Kota Bogor merupakan salah satu Kota di Indonesia yang tepatnya terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor merupakan wilayah penyanggah Ibu Kota yang menjadi penunjang berbagai layanan, pusat aktivitas nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Secara geografis Kota Bogor ini terletak diantara 106°48' Bujur Timur dan 6°26' Lintang Selatan.

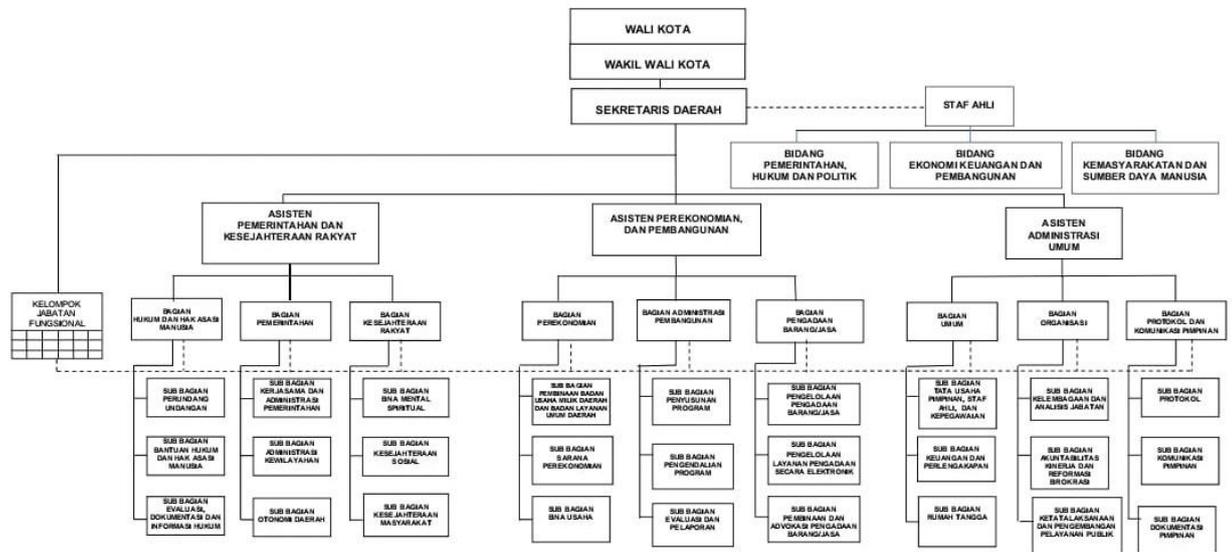
Kota Bogor memiliki rata – rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Selain itu, kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata – ratanya adalah 26°C dengan suhu terendah yaitu 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C. Kota Bogor memiliki kelembaban udara 70% dengan curah hujan rata – rata sekitar 345 mm setiap bulan dan 3.500 – 4.000 mm setiap tahun dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan Desember. Kota Bogor ini dilalui oleh dua sungai, yaitu Sungai Ciliwung yang memiliki luas pengaliran 211 kilometer persegi dan Sungai Cisadane yang mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi.

Kota Bogor memiliki luas tanah sebesar 11.850 Ha yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Dimana secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah, 31 kecamatan, 37 desa, 210 dusun, 623 RW, dan 2.712 RT. Kota Bogor ini terdapat di tengah – tengah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor

### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

#### A. Struktur Organisasi



Sumber: <https://setda.kotabogor.co.id>

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bogor

Keterangan :

———— : Garis Instruktif/Commanding Line

- - - : Garis Koordinat/Coordinative Line

#### B. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi dapat dikatakan sebagai tujuan masa depan suatu organisasi atau instansi. Maka visi Kota Bogor adalah “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka berikut adalah misi Kota Bogor tahun 2019 – 2024:

1. Mewujudkan Kota yang Sehat
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera

### C. Uraian Tugas

1. Wali Kota, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut :
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  - b. Memelihara ketentraman dan keterbiban masyarakat
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
  - d. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
  - e. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
2. Wakil Wali Kota, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut :
  - a. Membantu Wali Kota dalam :
    - Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
    - Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan
    - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah
  - c. Melaksanakan tugas dan wewenang Wali Kota apabila Wali Kota menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan Wali Kota yang ditetapkan sebagai keputusan kepala daerah
3. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kota
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Sekretariat DPRD, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
  - d. Penyedia dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan menagwasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari wali kota
  - d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
  - e. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi
  - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan
  - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya
6. Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas fungsinya
7. Badan Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegaitan kelurahan
  - h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan

## **4.2 Variabel yang Diteliti**

### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor**

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. PAD ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain – Lain PAD yang Sah. PAD juga umumnya digunakan sebagai sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh sebab itu, PAD harus diupayakan untuk terus mengalami

peningkatan untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Berikut terdapat detail dari jumlah realisasi PAD Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020 :

Tabel 4.1

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2013 – 2020 (Dalam Miliar)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	341.41	376.48	398.43	492.13	555.47	592.97	689.54	509.03
Retribusi Daerah	73.63	77.16	46.21	62.72	49.04	48.41	51.36	35.01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.56	23.68	28.80	33.10	29.94	26.77	28.24	31.92
Lain – Lain PAD yang Sah	30.07	67.49	154.13	195.90	343.72	244.02	246.73	296.04
Jumlah PAD	464.69	544.83	627.59	783.87	978.19	912.19	1.015.88	872.01

*Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)*

Dalam tabel 4.1 dapat dilihat bahwa PAD Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perolehan PAD yang paling tinggi yaitu diperoleh dari pajak daerah dan paling rendah yaitu diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk mengetahui perkembangan PAD dapat dihitung menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah dengan rumus:

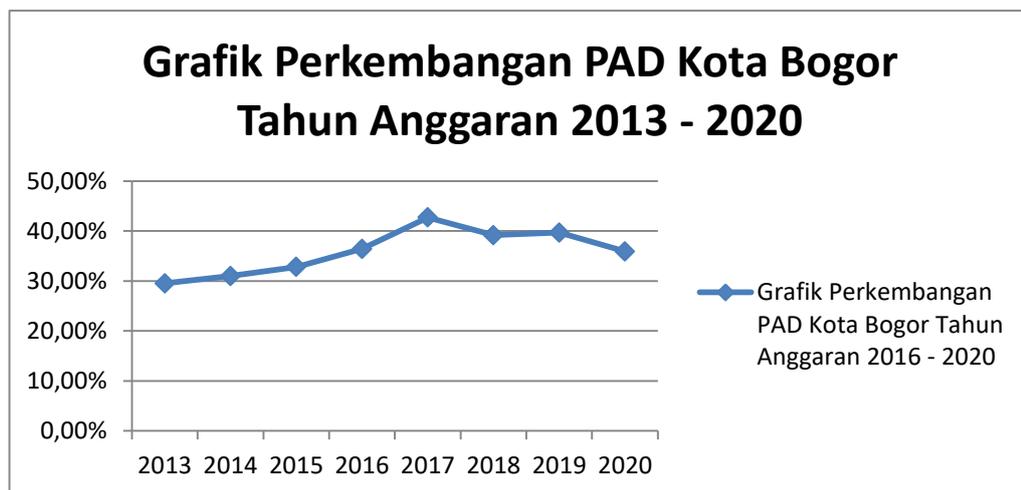
$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2013 – 2020 (Dalam Miliar)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	%
2013	464.69	1.574.37	29.51
2014	544.83	1.757.69	30.99
2015	627.59	1.913.21	32.80
2016	783.87	2.152.37	36.41
2017	978.19	2.289.35	42.72
2018	912.19	2.328.70	39.17
2019	1.015.88	2.559.85	39.68
2020	872.01	2.428.57	35.90

Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)



Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)

Gambar 4.2

#### Grafik Perkembangan PAD Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020

Dalam tabel 4.2 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa PAD Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 yang dihitung dengan rasio kemampuan keuangan daerah terus mengalami perubahan. Dimana pada tahun 2013 hasil rasio kemampuan keuangan daerah, yaitu sebesar 29,51%. Kemudian pada tahun 2014 – 2017 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 30,99%, 32,80%, 36,41%, dan 42,72%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 39,17%. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 39,68%. Pada tahun 2020 menurun drastis menjadi sebesar 35,90%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD tidak maksimal dan perlu untuk terus

dikelola dan ditingkatkan kembali guna dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun penurunan PAD salah satunya diakibatkan adanya pandemi Covid – 19 sehingga segala aktivitas masyarakat dibatasi yang menyebabkan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir menurun.

#### 4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ini juga dapat disebut sebagai dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, DAU harus diupayakan untuk tidak terus meningkat untuk menghindari tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berikut terdapat detail jumlah realisasi DAU Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020 dan perkembangan DAU yang dihitung dengan rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah dengan rumus:

Rasio Ketergantungan DAU Terhadap Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

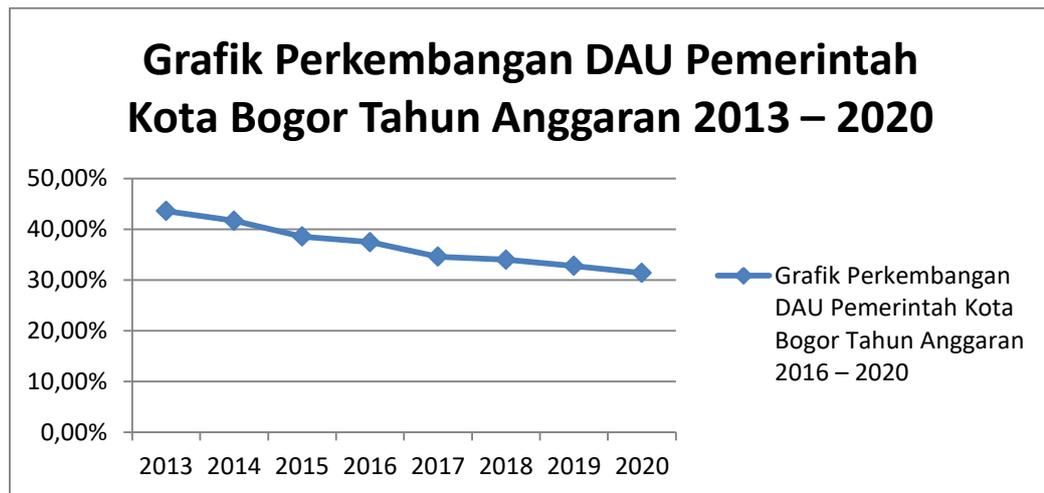
Tabel 4.3

Rasio Ketergantungan DAU terhadap Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor

Tahun Anggaran 2013 – 2020 (Dalam Miliar)

Tahun	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)	Total Pendapatan Daerah	%
2013	686.52	1.574.37	43.60
2014	732.33	1.757.69	41.66
2015	737.83	1.913.21	38.56
2016	806.08	2.152.37	37.45
2017	791.92	2.289.35	34.59
2018	791.92	2.328.70	34.00
2019	838.94	2.559.85	32.77
2020	762.55	2.428.57	31.39

Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)



Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)

Gambar 4.3

#### Grafik Perkembangan DAU Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020

Dalam tabel 4.3 dan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa realisasi DAU Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 mengalami fluktuasi. Namun, jika dihitung dengan rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah hasilnya terus mengalami penurunan. Semakin tinggi rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah maka semakin tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dimana pada tahun 2013 hasil rasio ketergantungan DAU yaitu sebesar 43,60%. Kemudian pada tahun 2014 – 2020 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 41,66%, 38,56%, 37,45%, 34,59%, 34,00%, 32,77% dan 31,39%. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai ketergantungan DAU tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 43,60% dan nilai ketergantungan DAU terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 31,39%. Adapun penurunan DAU diakibatkan turunnya transfer dana dari pusat disebabkan penerimaan negara yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

#### 4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sama halnya dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus juga merupakan dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu meminimalkan penggunaannya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Berikut terdapat detail jumlah realisasi DAK Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020 dan perkembangan DAK yang dihitung dengan rasio ketergantungan DAK terhadap keuangan daerah dengan rumus:

Rasio Ketergantungan DAK Terhadap Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan ketergantungan DAK terhadap keuangan daerah tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rasio Ketergantungan DAK terhadap Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2013 – 2020 (Dalam Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Total Pendapatan Daerah	%
2013	19.66	1.574.37	1.24
2014	33.47	1.757.69	1.90
2015	8.61	1.913.21	0.45
2016	194.68	2.152.37	9.04
2017	190.01	2.289.35	8.29
2018	179.87	2.328.70	7.72
2019	189.89	2.559.85	7.41
2020	195.60	2.428.57	8.05

Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)



Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)

Gambar 4.4

Grafik Perkembangan DAK Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020

Dalam tabel 4.4 dan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa realisasi DAK Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 mengalami fluktuasi. Sama halnya jika dihitung dengan rasio



<b>Pemerintah Pusat – Lainnya :</b>								
Dana Penyesuaian	154.90	157.30	202.79	0.00	0.00	0.00	41.07	28.92
<b>Transfer Pemerintah Provinsi :</b>								
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.38	175.44	200.62	199.83	221.01	236.56	252.13	255.59
<b>Total Dana Transfer</b>	<b>1.082.26</b>	<b>1.188.39</b>	<b>1.218.37</b>	<b>1.297.44</b>	<b>1.293.50</b>	<b>1.303.33</b>	<b>1.455.64</b>	<b>1.415.49</b>

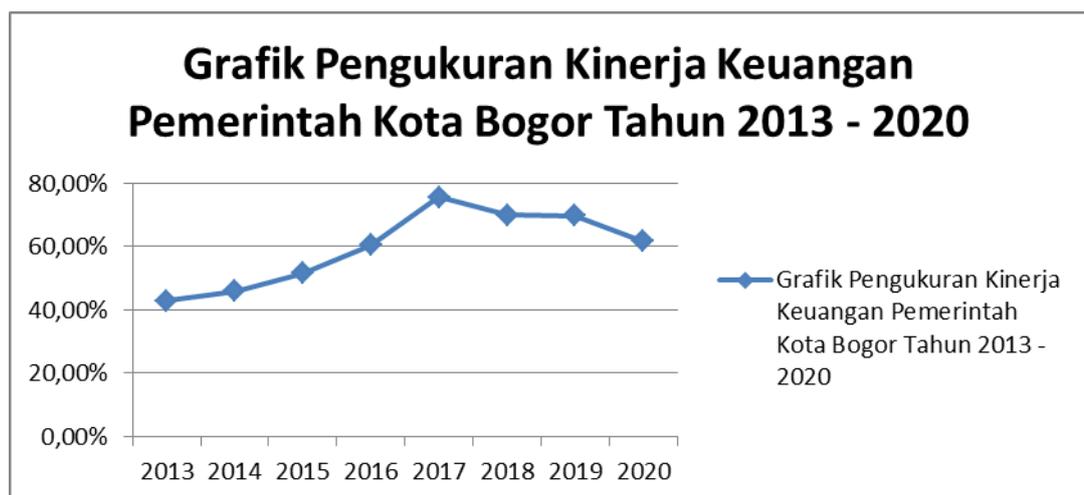
Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)

Tabel 4.6

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 – 2020 (Dalam Miliar)

Tahun	PAD	Dana Transfer	%
2013	464.69	1.082.26	42.93
2014	544.83	1.188.39	45.84
2015	627.59	1.218.37	51.51
2016	783.87	1.297.44	60.41
2017	978.19	1.293.50	75.62
2018	912.19	1.303.33	69.98
2019	1.015.88	1.455.64	69.78
2020	872.01	1.415.49	61.60

Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)



Sumber: BPS Kota Bogor (data diolah, 2022)

Gambar 4.5

## Grafik Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013 – 2020

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 mengalami fluktuasi yang dihitung dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Dimana kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor pada tahun 2013 yaitu sebesar 42,93%. Kemudian dari tahun 2014 – 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 45,84%, 51,51%, 60,41%, dan 75,62%. Namun, dari tahun 2018 – 2020 terus mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2018 sebesar 69,98% menjadi 69,78% pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 61,60%. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal dalam hal kemandirian keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut dikarenakan daerah tersebut sangat bergantung kepada sumber dana luar atau pemerintah pusat. Adapun penurunan kinerja keuangan diakibatkan penurunan PAD yang signifikan dibandingkan dengan dana transfer yang diperoleh.

### 4.3 Analisis Data

Selanjutnya akan dilakukan analisis data yang terdiri dari analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F). Pengujian statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 26. Berikut dibawah ini penjelasannya :

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan rata – rata. Berikut tabel hasil statistik deskriptif dari variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan.

Tabel 4.7

## Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	8	464.69	1015.88	774.9063	206.54305
Dana Alokasi Umum	8	686.52	838.94	768.5113	48.51521
Dana Alokasi Khusus	8	8.61	195.60	126.4738	88.06727
Kinerja Keuangan	8	42.93	75.62	59.7088	11.98364
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dalam tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jumlah data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 sampel (N). Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama periode 2013 – 2020, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ). Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kinerja Keuangan (Y).

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 memiliki nilai rata – rata (*mean*) sebesar 774.90 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 206.54. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1,015.88 dan nilai terendah (*minimum*) sebesar 464.69.

b. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Dana Alokasi Umum Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 memiliki nilai rata – rata (*mean*) sebesar 768.51 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 48.51. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 838.94 dan nilai terendah (*minimum*) sebesar 686.52.

c. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Dana Alokasi Khusus Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 memiliki nilai rata – rata (*mean*) sebesar 126.47 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 88.06. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 195.60 dan nilai terendah (*minimum*) sebesar 8.61.

d. Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Kinerja Keuangan Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020 memiliki nilai rata – rata (*mean*) sebesar 59.70 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 11.98. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 75.62 dan nilai terendah (*minimum*) sebesar 42.93.

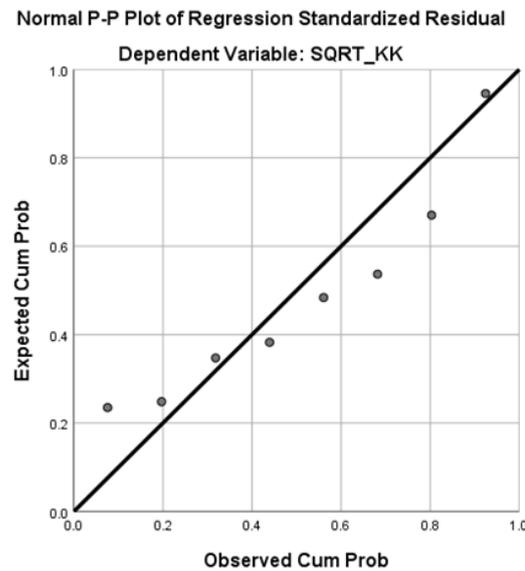
### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan analisis regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi lebih dahulu, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya auto korelasi, dan tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian yang dapat dipercaya. Apabila semua syarat terpenuhi maka hasil regresi dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Berikut hasil uji asumsi klasik untuk model regresi linier berganda :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Jika tidak normal maka prediksi yang telah dilakukan dengan metode tersebut akan tidak baik atau dapat menghasilkan prediksi yang menyimpang. Dalam penelitian ini

pengujian normalitas menggunakan uji plot dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan level signifikan sebesar 0,05. Apabila hasilnya menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Berikut hasil pengolahan uji normalitas :



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Gambar 4.6

#### Hasil Uji Normalitas Plot

Dalam Gambar 4.6 dapat kita lihat bahwa plotting (titik – titik) yang menggambarkan data mengikuti atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi berdistribusi dinyatakan normal. Untuk memastikan kembali data tersebut maka di uji kembali dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4.8

#### Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04724353
Most Extreme Differences	Absolute	.201
	Positive	.201
	Negative	-.170
Test Statistic		.201

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dalam tabel 4.8 dapat dilihat bahwa uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, didapatkan nilai signifikansi (*Asymp.Sig 2-tailed*) sebesar 0,200. Maka dengan hasil  $> 0,05$  ( $0,200 > 0,05$ ), dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi sehingga penulis dapat melanjutkan ke uji berikutnya.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factory* (VIF). Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengolahan uji multikolinearitas :

Tabel 4.9  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.916	10.105			
	Pendapatan Asli Daerah	2.276	.167	.868	.254	3.931
	Dana Alokasi Umum	-.390	.162	-.141	.301	3.317
	Dana Alokasi Khusus	.049	.203	.015	.274	3.655
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dalam tabel 4.9 dapat kita lihat bahwa nilai *Tolerance* pada PAD, DAU, dan DAK masing – masing yaitu sebesar 0,254, 0,301, dan 0,274 maka variabel independen lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) pada PAD, DAU, dan DAK masing – masing yaitu sebesar 3,931, 3,317, dan 3,655 maka

variabel independen lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya gejala multikolinearitas. Demikian penulis dapat melanjutkan ke uji berikutnya.

### 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  atau periode sebelumnya. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan Run Test. Jika hasil nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)*  $> 0,05$  maka tidak ditemukan gejala autokorelasi. Berikut hasil pengolahan uji autokorelasi :

Tabel 4.10  
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.01061
Cases < Test Value	4
Cases $\geq$ Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	6
Z	.382
Asymp. Sig. (2-tailed)	.703
a. Median	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.10 dapat dilihat hasil uji autokorelasi dengan metode Run Test diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)*, yaitu sebesar 0,703 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi sehingga penulis dapat melanjutkan ke uji berikutnya.

### 4) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan Gleser dan *Scatterplots*. Dimana apabila tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *Scatterplots*, serta titik – titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 sumbu Y dan nilai signifikan lebih besar 0,05 maka tidak ditemukan gejala heterokedastisitas. Berikut hasil pengolahan uji heterokedastisitas :

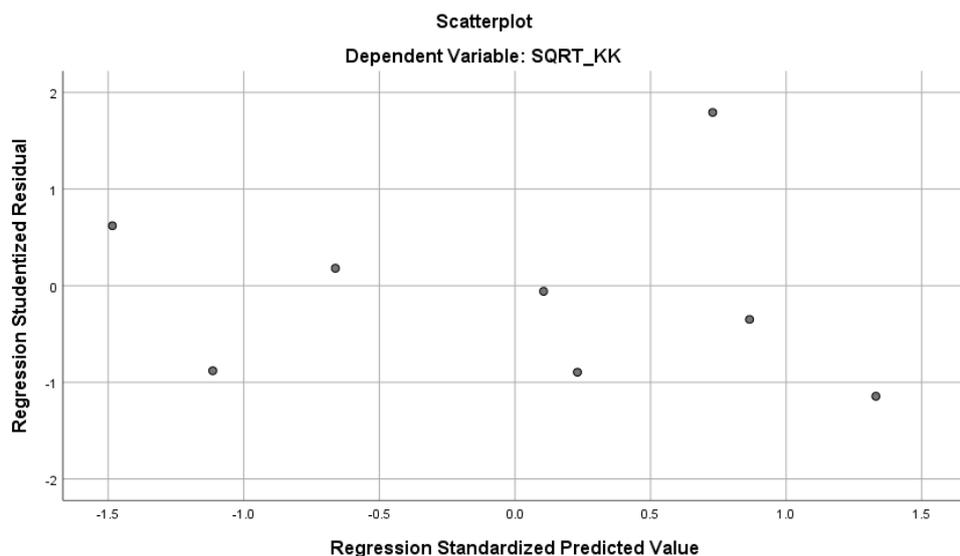
Tabel 4.11  
Hasil Uji Heterokedastisitas Gleser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.251	.786		-.319	.766
	SQRT_PAD	.030	.077	.374	.393	.714
	SQRT_DAU	.016	.075	.187	.217	.839
	SQRT_DAK	.002	.029	.060	.069	.949

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan pada Tabel 4.11 dapat kita lihat bahwa nilai signifikan PAD, DAU, dan DAK lebih besar dari 0,05. Untuk memastikan kembali data tersebut maka di uji kembali dengan menggunakan *Scatterplots*.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Gambar 4.7

#### Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplots*

Berdasarkan pada Gambar 4.7 dapat kita lihat bahwa titik – titik tidak membentuk pola yang jelas. Kemudian dapat dilihat titik – titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala heterokedastisitas sehingga penulis dapat melanjutkan ke uji berikutnya.

### 4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk dapat melanjutkan analisis regresi linier berganda maka terlebih dahulu asumsi klasik dipenuhi seperti pada uji asumsi klasik diatas, yaitu residual yang terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

a : Konstanta

X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi Variabel Independen

e : eror

Berikut terdapat hasil dari uji koefisien regresi linier berganda pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.12

#### Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.916	10.105		-.783	.477		
	Pendapatan Asli Daerah	2.276	.167	.868	13.641	.000	.254	3.931
	Dana Alokasi Umum	-.390	.162	-.141	-2.414	.073	.301	3.317
	Dana Alokasi Khusus	.049	.203	.015	.241	.822	.274	3.655
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan								

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dalam tabel 4.12 dapat dilihat bahwa pada kolom B *Unstandardized Coefficient* persamaannya yaitu  $Y = -7,916 - 2,276 (PAD) - 0,390 (DAU) + 0,049 (DAK)$ , interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar - 7,916 artinya apabila semua variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK nilainya adalah 0, maka pengungkapan Kinerja Keuangan Daerah nilainya adalah - 7,916.
- b. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif sebesar 2,276, hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan kinerja keuangan daerah sebesar 2,276.
- c. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai - 0,390, hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1% maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan daerah sebesar - 0,390 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- d. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai 0,049, hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan kinerja keuangan daerah sebesar 0,049.

#### 4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Uji hipotesis ini terdiri dari uji parsial (t) dan uji simultan (uj F). dan uji koefisien determinasi:

##### 1. Uji Parsial (t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil pengujian koefisien secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13

#### Hasil Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.916	10.105		-.783	.477		
	Pendapatan Asli Daerah	2.276	.167	.868	13.641	.000	.254	3.931

Dana Alokasi Umum	-.390	.162	-.141	-2.414	.073	.301	3.317
Dana Alokasi Khusus	.049	.203	.015	.241	.822	.274	3.655
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan							

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.13, hasil uji signifikansi parameter individual (uji t), yaitu sebagai berikut :

a. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Dilihat dalam hasil tabel 4.12 terlihat bahwa PAD memiliki nilai Sig. 0,000 dan  $t_{hitung}$  sebesar 13,641. Karena signifikansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $13,641 > 2,776$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka **hipotesis pertama (H1) diterima.**

b. Pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Dilihat dalam tabel 4.12 terlihat bahwa DAU memiliki nilai Sig. 0,073 dan  $t_{hitung}$  sebesar - 2,414. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,073 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $- 2,414 < 2,776$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka **hipotesis kedua (H2) ditolak.**

c. Pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Dilihat dalam tabel 4.12 terlihat bahwa DAK memiliki nilai Sig. 0,822 dan  $t_{hitung}$  sebesar 0,241. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,822 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,241 < 2,776$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka **hipotesis ketiga (H3) ditolak.**

## 2. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat (dependen). Pada pengujian ini memiliki nilai signifikansi 0,05. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien secara simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14  
Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1001.110	3	333.703	322.163	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4.143	4	1.036		
	Total	1005.253	7			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah						

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 322,163 dengan taraf signifikan sebesar 0,000, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  adalah sebesar 6,591. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $322,163 > 6,591$ ) hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan yakni PAD, DAU, dan DAK Pemerintah Kota Bogor secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan demikian **hipotesis keempat (H4) diterima**.

### 3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen).

Tabel 4.15  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998 <sup>a</sup>	.996	.993	1.01775	2.452
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat kita lihat ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*) yang disesuaikan (*adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the Estimate*). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,996 atau 99,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,4% (100% - 99,6%) dipengaruhi variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### **4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020, maka dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut :

##### **4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor**

PAD umumnya digunakan sebagai sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh sebab itu, PAD harus diupayakan untuk terus mengalami peningkatan untuk pelayanan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah yang dapat kita lihat dalam tabel 4.2, menunjukkan bahwa PAD terus mengalami perubahan (fluktuasi) dari tahun 2013 – 2020. Hal ini diperoleh berdasarkan jumlah realisasi PAD yang berubah setiap tahunnya. Dilihat dari hasil keseluruhan perhitungan dapat kita simpulkan bahwa tingkat rasio kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 masih menunjukkan tingkat rata – rata sebesar 35,89% yang menunjukkan cukup rendahnya peranan PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dikarenakan masih terdapatnya ketergantungan terhadap dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,641 > 2,776$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020.

PAD yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini dikarenakan apabila PAD meningkat maka akan terjadi peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya sehingga dapat memberikan indikasi bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor telah baik.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Halmawati (2021) yang menyatakan bahwa PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Prastiwi dan Aji (2020) juga menyatakan bahwa tingginya PAD yang mampu dihasilkan akan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap pendanaan yang bersumber dari pusat. Dan Verawaty, et al (2020) yang menyatakan bahwa daerah dengan PAD yang besar akan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih besar.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor**

DAU merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mencerminkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah yang dapat kita lihat dalam tabel 4.3, menunjukkan bahwa DAU terus mengalami penurunan dari tahun 2013 – 2020. Dilihat dari hasil keseluruhan perhitungan dapat kita simpulkan bahwa tingkat rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah pemerintah Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 menunjukkan tingkat rata – rata sebesar 36,75%.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi  $0,073 > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-2,414 < 2,776$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020.

DAU yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini dikarenakan DAU merupakan dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk membantu membiayai kelebihan belanja daerah agar tidak terjadi defisit. DAU diantaranya digunakan untuk membantu mendanai gaji pegawai, tunjangan pegawai, pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga DAU belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjito, Nugraha dan Yulianto (2020) yang menyatakan bahwa DAU bukan berasal dari kreativitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Verawaty, et al (2020) juga menyatakan bahwa dengan semakin tingginya DAU yang diterima maka akan menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dan Machmud dan Radjak (2018) yang menyatakan bahwa DAU yang semakin besar maka dapat berdampak pada penurunan nilai efisiensi atau kinerja keuangan.

#### **4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor**

DAK merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Semakin besar dana alokasi khusus yang diperoleh maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mencerminkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio ketergantungan DAK terhadap keuangan daerah yang dapat kita lihat dalam tabel 4.4, menunjukkan bahwa DAK terus mengalami perubahan (fluktuasi) dari tahun 2013 – 2020. Dilihat dari hasil keseluruhan perhitungan dapat kita simpulkan bahwa tingkat rasio ketergantungan DAK terhadap keuangan daerah pemerintah Kota Bogor dari tahun 2013 – 2020 menunjukkan tingkat rata – rata sebesar 5,51%.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi  $0,822 > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,241 < 2,776$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020.

DAK yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini dikarenakan DAK merupakan dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. DAK diantaranya digunakan untuk membantu mendanai pembangunan jembatan, pengadaan alat kesehatan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan dana bantuan operasional sekolah. Sehingga DAK belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjito, Nugraha, dan Yulianto (2020) yang menyatakan bahwa setiap peningkatan DAK maka akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Jauhar (2016) juga menyatakan bahwa semakin tinggi DAK maka akan menimbulkan rendahnya kinerja keuangan yang diperoleh. Dan Verawaty, et al (2020) yang menyatakan bahwa semakin besar DAK yang diterima maka dapat memperlihatkan semakin kuatnya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun.

#### **4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan (Uji F) pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $322,163 > 6,591$ . Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 - 2020.

Selain itu berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 diperoleh nilai sebesar 0,996 atau 99,6% yang menunjukkan bahwa variasi dari kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, dan DAK sedangkan sisanya sebesar 0,4% dipengaruhi oleh variabel independen lain. Hal tersebut juga menandakan bahwa penelitian yang dilakukan termasuk dalam tingkat hubungan yang kuat dan layak untuk diteliti.

PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini dikarenakan jika dialokasikan secara bersama – sama dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah maka dapat meningkatkan pembangunan daerah serta kinerja keuangan daerah. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun secara parsial hanya 1 variabel yaitu PAD yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan secara keseluruhan PAD, DAU, dan DAK merupakan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyono, Fatimah, dan Nurcahya (2022) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama – sama jika digunakan secara efisien dalam membiayai program – program pembangunan daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan. Machmud dan Radjak (2018) juga menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penulis melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2020. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $13,641 > 2,132$ . Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya penerimaan PAD maka semakin meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. PAD yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan apabila PAD meningkat maka akan terjadi peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kota Bogor memiliki tingkat kemandirian yang baik sehingga dapat membiayai sendiri kegiatan pembangunan daerahnya dengan menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber PAD.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel dana alokasi umum yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 yaitu sebesar 0,073 dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $- 2,414 < 2,132$ . Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan DAU belum memiliki kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. DAU yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan DAU merupakan dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk membantu membiayai kelebihan belanja daerah agar tidak terjadi defisit.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 yaitu sebesar 0,822 dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $0,241 < 2,132$ . Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan DAK belum memiliki kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. DAK yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan DAK merupakan dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013 – 2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai  $f_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $f_{tabel}$  yaitu  $322,163 > 6,591$ . Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK secara bersama – sama memiliki kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan jika dialokasikan secara bersama – sama dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah serta kinerja keuangan daerah.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### 5.2.1 Kegunaan Praktis

1. Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam wajib pajak serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar penerimaan PAD dapat semakin meningkat.
2. Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu untuk mengelola keuangan daerah dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berupa dana transfer seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka pemerintah daerah Kota Bogor dapat tercapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerahnya.
3. Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) pada sektor – sektor yang dapat meningkatkan pembangunan daerah sehingga penggunaannya menjadi efisien.

### 5.2.2 Kegunaan Akademis

Untuk dapat mendukung dan menguatkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian selanjutnya. Adapun penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan sampel yang lebih luas, seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui daerah mana saja yang sudah mencapai kemandirian.

2. Diharapkan dapat menambah atau mengubah variabel independen untuk mengetahui lebih lanjut pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
3. Diharapkan dapat menggunakan rasio keuangan yang berbeda untuk mengukur kinerja keuangan seperti rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H. & Majid, M. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh*. *Jurnal Magister Akuntansi*. [Online] Vol. 5 No. 3. Tersedia di: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4523>
- Angelina, N., Efni, Y. & Rasuli, M. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018*. *Jurnal Bahtera Inovasi*. [Online] Vol. 4 No. 1. Tersedia di: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2757>
- Budianto & Alexander, S. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*. [Online] Vol. 4 No. 4. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14511>
- Firdausy, C. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harjito, Y., Nugraha, G., & Yulianto. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. [Online] Vol. 5 No. 1. Tersedia di: <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14061>
- Heryanti, C., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. [Online] Vol. 8 No. 8. Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4261>
- Jauhar, F. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi*. [Online] Vol. 4 No. 1 Tersedia di: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2355>
- Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kiak, N. & Nuro, S. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2016*. *Oeconomicus Journal Of Economics*. [Online] Vol. 5 No. 1. Tersedia di: <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/137>
- Machmud, J. & Radjak, L. (2018). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten*

- Gorontalo. JAS. [Online] Vol. 2 No. 1. Tersedia di: <https://jas.umsida.ac.id/index.php/jas/article/view/1561>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press. Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almada.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 202 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127005/pmk-no-202pmk072012>
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Walikota Bogor No. 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174455/perwali-kota-bogor-no-17-tahun-2021>
- Prakoso, J., Ismali, F. & Sugiharti, R. (2019). *Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Jurnal REP. [Online] Vol. 4 No. 1. Tersedia di: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1344>
- Prastiwi, N. & Aji, A. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2018)*. Jurnal Kajian Bisnis. [Online] Vol. 28 No. 1. Tersedia di: <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/45>
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). *Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah*. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan. [Online] Vol. 5 No. 2. Tersedia di: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/2202>
- Putri, N. & Darmayanti, N. (2019). *Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*. E-Jurnal Management. [Online] Vol. 8 No. 5. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/44688>

- Saraswati, D. & Rioni, Y. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik. [Online] Vol. 9 No. 2. Tersedia di: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/462>
- Sari, B. & Halmawati. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. [Online] Vol. 3 No. 1. Tersedia di: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/356>
- Siregar, H. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis. [Online] Vol. 1 No. 1. Tersedia di: <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/article/view/286>
- Suhaedi, W. (2019). *Analisis Belanja Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma. [Online] Vol.18 No. 2. Tersedia di: <http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/82>
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Tersedia di: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Verawaty., et al. (2020). *Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. MBIA. [Online] Vol. 19 No. 1. Tersedia di: <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/mbia/article/view/560>
- Yuesti, A., et al. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y. & Wiriani, E. (2019). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Langsa*. Jurnal Samudra Ekonomika. [Online] Vol. 3 No. 1. Tersedia di: <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/1289>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shalaisya Labiba Khayyira Widodo  
Alamat : Komplek Mulia Residence RT 002/008, Kel. Laladon  
Kec. Ciomas Kab. Bogor, 16610

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 5 Oktober 2000

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Gadis Sukabumi
- SMP : SMPN 2 Kota Bogor
- SMA : SMA Rimba Madya Kota Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Oktober 2022

Peneliti

Shalaisya Labiba Khayyira Widodo

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Tabel Uji t

**Tabel Uji t**

df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
1	6,314	12,706
2	2,920	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,860	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,160
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,120
17	1,740	2,110
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,080
22	1,717	2,074
23	1,714	2,069
24	1,711	2,064
25	1,708	2,060
26	1,706	2,056
27	1,703	2,052
28	1,701	2,048
29	1,699	2,045
30	1,697	2,042
31	1,696	2,040
32	1,694	2,037
33	1,692	2,035
34	1,691	2,032
35	1,690	2,030
36	1,688	2,028
37	1,687	2,026
38	1,686	2,024
39	1,685	2,023
40	1,684	2,021
41	1,683	2,020

## Lampiran 2 Tabel Uji F

Tabel Uji F

$\alpha =$ 0,05	$df_1=(k-1)$							
	$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278